



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PENAMBAHAN KUOTA KREDIT USAHA RAKYAT 2025

Muhammad Zulfikar Emir Zanggi
Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhammad.zanggi@dpr.go.id

Lisnawati
Analisis Legislatif Ahli Muda
lisnawati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah merencanakan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun pada tahun 2025. Rencana kuota tahun 2025 tersebut naik dibandingkan dengan kuota tahun 2024 sebesar Rp280 triliun. Penyaluran KUR pada tahun 2024 berhasil melebihi target yang ditetapkan, dengan sektor produksi menjadi penyumbang terbesar. Realisasi penyaluran KUR hingga 23 Desember 2024 mencapai Rp280,28 triliun, atau 100,10% dari target tahun 2024 sebesar Rp280 triliun. Peningkatan kuota KUR ini bertujuan agar lebih banyak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat memanfaatkan fasilitas pinjaman KUR.

Berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, per tahun 2024, UMKM masih menjadi pilar utama ekonomi nasional karena mencakup sekitar 99% total unit usaha di Indonesia. Selain itu, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat signifikan, mencapai 60,51%, dan hampir 97% tenaga kerja di Indonesia terserap oleh sektor ini. Peningkatan kuota KUR memungkinkan lebih banyak pelaku usaha untuk memperoleh bantuan modal, yang pada gilirannya dapat mempercepat pertumbuhan usaha mereka. Dengan penetapan target penyaluran KUR yang lebih tinggi, diharapkan pada tahun 2025, penyaluran KUR dapat mencakup lebih dari 2 juta debitur KUR baru dan 1 juta debitur yang berhasil bergraduasi.

Ketua Komisi VII DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, menyatakan bahwa anggaran Rp300 triliun akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar ini untuk kepentingan masyarakat di masa mendatang. Ini menandakan bahwa pemerintah menunjukkan perhatian mereka terhadap UMKM. Modal menjadi salah satu elemen utama yang krusial dalam mendukung perkembangan usaha kecil. Dengan dukungan modal ini, usaha kecil bisa tumbuh, naik kelas, dan memberikan dampak ekonomi yang sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8%.

Selain itu, peningkatan kuota KUR diharapkan dapat mendorong pelaku UMKM untuk terlibat dalam program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dengan cara ini, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi kerakyatan yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa UMKM mitra MBG akan mendapatkan akses permodalan awal melalui Himpunan Bank Negara (Himbara) dan bank lainnya. Akses ini penting karena pengelola dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG perlu menanggung biaya bahan baku terlebih dahulu sebelum memperoleh penggantian. Hal ini bisa menjadi beban bagi UMKM.

Peningkatan kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga membawa beberapa tantangan, terutama dalam hal ketepatan penyaluran. Dibutuhkan data UMKM yang terbaru dan komprehensif agar pembiayaan bisa lebih tepat sasaran. Kementerian UMKM diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam memastikan kelancaran penyaluran KUR. Tantangan lain adalah pengelolaan *Non-Performing Loan* (NPL) atau kredit macet, yang saat ini tercatat sebesar 2,19%

untuk KUR, sedikit lebih rendah dibandingkan NPL nasional yang mencapai 2,21% menurut data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Meskipun kuota pembiayaan meningkat, bank tetap harus selektif dalam menyalurkan KUR untuk menjaga kesehatan finansial.

Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengusulkan agar perbankan tidak memberatkan calon nasabah KUR dengan persyaratan agunan yang terlalu ketat. Jika perbankan dan Kementerian UMKM khawatir mengenai kelayakan usaha, KUR sebaiknya diprioritaskan untuk pedagang pasar yang sering kali terpaksa bergantung pada rentenir dengan bunga tinggi. Dengan langkah ini, KUR dapat menjadi solusi yang efektif untuk memperkuat perekonomian rakyat dan mendorong pertumbuhan usaha kecil.

Atensi DPR

Pemerintah berencana untuk meningkatkan penyaluran KUR dari yang sebelumnya Rp280 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp300 triliun pada tahun 2025. Rencana ini mendapat dukungan dari berbagai pemangku kepentingan. Kenaikan kuota permodalan ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi kerakyatan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Namun, tantangan utama dalam peningkatan KUR adalah memastikan penyaluran yang tepat sasaran kepada debitur UMKM penerima KUR dan pemanfaatan KUR untuk modal usaha.

Komisi VII DPR RI perlu memastikan bahwa UMKM mendapatkan manfaat permodalan sesuai dengan peningkatan kuota KUR. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian UMKM untuk memiliki data yang akurat dan menyeluruh tentang UMKM di Indonesia. Selain itu, Komisi VII DPR RI harus mengawasi agar KUR benar-benar digunakan untuk permodalan, bukan untuk kebutuhan hidup atau lainnya. Pendampingan kepada pelaku UMKM juga penting agar debitur KUR memiliki usaha yang berkembang dan mengurangi risiko kredit macet.

Sumber

ekon.go.id, 24 Desember 2024;
finance.detik.com, 06 Februari 2025;
mediaindonesia.com, 06 Februari 2025;
rri.co.id, 05 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*